

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2032, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pariwisata tersebut mengalami kegagalan transmisi ekonomi yang mana peningkatan kunjungan wisatawan tidak diikuti oleh peningkatan PAD maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat secara proporsional. Kesimpulan ini didukung oleh bukti konkret pada tiga lapis analisis: *resource effects* (manfaat materiil yang diterima atau tidak diterima masyarakat), *interpretive effects* (cara proses kebijakan dimaknai oleh masyarakat), dan diagnosis kegagalan kebijakan menurut McConnell (2010) pada level proses, program, dan politik. Oleh karena itu simpulan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mekanisme *Resource Effects* dan *Interpretive Effects* dalam Implementasi RIPK terhadap PAD dan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Secara sederhana, manfaat ekonomi dari RIPK tampak lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara cara kebijakan ini dijalankan justru membuat masyarakat semakin enggan terlibat. Dari sisi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat (*resource effects*), pertumbuhan sektor akomodasi berskala besar terlihat lebih cepat dibanding usaha kecil masyarakat seperti pedagang dan

pelaku UMKM. Kondisi ini diperkuat oleh anggaran dinas pariwisata yang terus berkurang, layanan dasar seperti pengelolaan sampah dan pelatihan kelompok wisata yang minim, serta pembangunan infrastruktur yang belum banyak berkembang. Jumlah kunjungan wisatawan memang meningkat cukup tinggi, tetapi peningkatan PAD tidak sebanding, yang mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan belum sepenuhnya "menetes" ke penerimaan daerah maupun ke masyarakat sekitar. Hal ini terlihat jelas ketika membandingkan dua kawasan wisata yang diteliti: pedagang di kawasan yang dikelola langsung oleh dinas melaporkan pendapatan yang jauh lebih kecil dibandingkan pedagang di kawasan yang justru dikelola secara mandiri oleh masyarakat tanpa bantuan dinas sama sekali. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa persoalan utamanya bukan karena potensi wisata di daerah tersebut kecil, melainkan karena dukungan dan perhatian pemerintah daerah yang masih terbatas.

Dari sisi bagaimana kebijakan ini dijalankan dan dimaknai masyarakat (*interpretive effects*), ditemukan tiga hal yang tampak membuat masyarakat semakin pasif. Pertama, RIPK ternyata tidak dimasukkan sebagai acuan dalam rencana kerja tahunan dinas pariwisata, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan RIPK lebih bergantung pada perhatian pribadi pejabat tertentu, bukan menjadi kebiasaan kerja yang melembaga. Target PAD yang ditetapkan pun tampak tidak berdasarkan kajian yang matang, sehingga jauh berbeda dari kondisi riil di lapangan. Kedua, cara dinas melakukan perbaikan kawasan wisata tanpa melibatkan masyarakat setempat tampak berkaitan dengan melemahnya kelompok sadar wisata di salah satu lokasi, berbeda dengan kawasan lain yang justru

dikelola atas inisiatif masyarakat sendiri melalui musyawarah adat setempat, dan menunjukkan rasa memiliki yang lebih kuat. Ketiga, keterbatasan anggaran di tengah target penerimaan yang tinggi tampak mendorong pejabat dinas mengambil langkah kehati-hatian untuk melindungi diri dari kemungkinan tuduhan penyalahgunaan wewenang, yang mengindikasikan bahwa target kebijakan dirasakan terlalu berat bahkan oleh pelaksananya sendiri. Ketiga hal ini bersama-sama membantu menjelaskan mengapa hampir seluruh kelompok sadar wisata di kabupaten ini tidak lagi aktif sebuah pola yang tampaknya lebih mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pengalaman berulang dengan birokrasi, dibanding sekadar sikap tidak peduli dari warga.

2. Bagaimana Implementasi RIPK 2016–2032 Ditinjau dari Teori *Policy Failure* (McConnell, 2010)

Pada tingkat proses, RIPK tidak dijadikan acuan resmi dalam dokumen perencanaan dinas, sehingga dokumen ini kehilangan kekuatan mengikat terhadap kerja tahunan dinas. Persoalan ini diperberat oleh kerja sama antarlembaga yang belum juga selesai dinegosiasikan selama bertahun-tahun, sehingga menghambat perbaikan infrastruktur di salah satu destinasi utama. Pada tingkat program, berbagai target utama RIPK tampak belum tercapai, seperti penerimaan PAD dari pariwisata yang jauh dari target, kelompok sadar wisata yang hampir seluruhnya tidak lagi aktif, anggaran operasional yang nyaris habis, izin usaha akomodasi baru yang jauh dari target, serta kerja sama antarlembaga yang masih belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya pada satu bagian

kecil, melainkan menyebar ke berbagai aspek program RIPK. Pada tingkat politik, berbagai kegagalan di atas tampak berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Kunjungan wisatawan pada momen-momen ramai sempat turun tajam setelah munculnya kasus pungutan liar yang ramai dibicarakan di media sosial, kepercayaan publik menurun setelah terungkapnya praktik kecurangan tiket oleh sebagian oknum, dan hampir semua kelompok sadar wisata di kabupaten ini sudah tidak aktif lagi. Sejumlah informan menilai kondisi ini lebih sebagai reaksi wajar masyarakat terhadap kebijakan yang belum banyak memberi manfaat nyata, bukan karena masyarakat gagal merespons kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa anggapan pariwisata akan otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (*Hipotesis Tourism-Led Growth*) tidak berlaku begitu saja tanpa syarat tertentu. Ada empat hal penting yang tampak belum terpenuhi dalam kasus RIPK Kabupaten Lima Puluh Kota Pertama, belum ada cara yang memastikan usaha kecil masyarakat ikut mendapat bagian yang adil dari pertumbuhan pariwisata, terlihat dari usaha besar seperti akomodasi yang tumbuh jauh lebih cepat dibanding usaha kecil seperti pedagang. Kedua, dukungan anggaran pemerintah untuk pariwisata belum konsisten, bahkan sempat habis sama sekali pada 2026. Ketiga, cara dinas mengelola kawasan wisata belum cukup melibatkan masyarakat setempat, seperti terlihat dari melemahnya Pokdarwis Lestari setelah perbaikan taman dilakukan tanpa melibatkan warga. Keempat, pelaksanaan kebijakan ini belum cukup transparan dan belum didasarkan pada kajian yang memadai, terlihat dari RIPK

yang tidak dijadikan konsiderans resmi dalam Renstra serta target PAD yang ditetapkan tanpa dasar kajian yang kuat. Selama keempat hal ini belum diperbaiki, sebaik apa pun rencana pembangunan pariwisata yang disusun di atas kertas, manfaatnya kemungkinan akan tetap sulit dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat lapangan, sebagaimana tampak pada kasus RIPK Kabupaten Lima Puluh Kota.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memperkuat keterikatan RIPK terhadap dokumen perencanaan operasional seperti Renstra Disparpora, menyusun target PAD pariwisata yang lebih realistis berbasis kajian potensi riil, mendorong kemitraan yang lebih inklusif antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan Pokdarwis lokal, memberikan pendampingan berkelanjutan bagi Pokdarwis pasca pembentukan, serta memastikan alokasi anggaran pemeliharaan destinasi yang lebih konsisten dari tahun ke tahun. Rekomendasi ini bersifat strategis dan diarahkan untuk mengatasi akar kegagalan proses, program, dan politik yang teridentifikasi dalam penelitian, tanpa dimaksudkan sebagai rancangan regulasi teknis yang rinci.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa *Hipotesis Tourism-Led Growth* memerlukan prasyarat kelembagaan yang eksplisit untuk dapat terealisasi di tingkat daerah, sehingga direkomendasikan agar penelitian selanjutnya menguji proposisi empat pilar (*value capture*, komitmen fiskal, kedekatan psikologis, dan

transparansi administrasi) yang dirumuskan dalam penelitian ini pada konteks kabupaten/kota lain dengan karakteristik geografis dan tata kelola yang berbeda, guna menilai generalisabilitasnya. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh mekanisme *value capture* pada model pengelolaan swadaya berbasis komunitas seperti yang ditemukan di Kapalo Banda Taram, sebagai basis pengembangan model tata kelola pariwisata alternatif yang dapat direplikasi pada kawasan dengan tingkat fragmentasi otoritas fiskal yang serupa.

